

Masyarakat Semakin Cerdas dan Kritis

Oleh : Drs. H. A. Hamdan, M.M

Dalam era globalisasi dan era informasi, dirasakan hubungan antar bangsa semakin dekat dan hubungan antar negara semakin tidak mengenal batas teritorial, terutama dalam hal komunikasi dalam hitungan detik sudah bisa diketahui oleh masyarakat dipelosok dunia, terlebih-lebih dengan kemajuan IT.

Disisi lain daya kritis masyarakat sangat berdampak pada pertentangan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah, bahkan tidak jarang kebijakan pemerintah mendapatkan hambatan untuk diimplementasikan, hal ini apabila tidak terdapat kesesuaian antara kepentingan masyarakat dengan kebijakan yang diterapkan. Disinilah diperlukan peranan humas untuk mampu meningkatkan citra positif.

Disadari ataupun tidak bahwa dalam fenomena sehari-hari masih dirasakan adanya kesenjangan informasi antara pemerintah dengan masyarakat, kadang-kadang informasi tidak nyampai secara utuh, sedangkan dipihak lain sering pula terjadi aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat tidak sampai kepada pemerintah.

Salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk memberikan pencitraan terhadap pemerintah bisa dilakukan melalui penguatan lembaga kehumasan, karena institusi itu sebagai pengelola informasi dan komunikasi, dengan catatan harus diberikan akses langsung kepada pimpinan, tanpa melewati hirarki birokrasi yang panjang.

Dalam beberapa seminar ataupun loka-karya sering muncul kepermukaan bahwa tidak efektifnya fungsi kehumasan disebabkan rendahnya eselonering institusi kehumasan, kompetensi sdm,rendahnya anggaran,minimnya sarana dan prasarana. Alasan klasik itu perlu dijawab oleh political will dari pucuk pimpinan, karena dampak dari tidak berfungsinya humas akan berakibat patal pada kesenjangan informasi.

Dengan semakin cerdas dan semakin kritisnya masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, maka dijelaskan oleh Mendagri dalam acara forum komunikasi kehumasan tanggal 1 Agustus 2006 di Jakarta, peran kehumasan harus mampu:

1. Memberikan pendidikan, pembelajaran, penceahan kepada masyarakat;
2. Menyampaikan informasi secara akurat,transparan dan komprehensif terhadap pesan dan kebijakan pemerintah;
3. Mengupayakan arah informasi yang dapat mempenaruhi opini publik dan pendapat umum agar terjadi kesamaan visi,misi dan persepsi antara masyarakat dan pemerintah, sehingga akan memunculkan good will dari masyarakat untuk dapat sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
4. Mengemas informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat,tepat, akurat,proporsional dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat, sehingga informasi tersebut tidak berkesan kakau dan formal yang akan berakibat kontra produktif hasil yang diharapkan.

Langkah-langkah konkrit yang dilakukan oleh Infokom Kota Sukabumi dalam menyikapi kecerdasan dan daya kritis masyarakat, dilakukan beberapa upaya, diantaranya:

1. Mengkomunikasikan kebijakan pemerintah daerah kota sukabumi kepada masyarakat melalui media dan saluran komunikasi, seperti halnya RSPD Fm di frekwensi 99,95 Mhz serta Majalah Bulanan Berita Kota sampai ke Ketua RW sebagai refresentasi dari masyarakat di tingkat RW.
2. Memberikan pelayanan informasi melalui web site di www.sukabumi.go.id dan www.kotasukabumi.com

3. Menjadi penghubung dalam menjembatani kepentingan pemerintah dan menampung aspirasi masyarakat melalui layanan SMS bernomor 081563200200
4. Berperan serta dalam menciptakan iklim kondusif dan dinamis untuk memelihara stabilitas keamanan politik, dengan membuka press center/pres room serta hadir dalam setiap pertemuan masyarakat baik formal maupun informal.
5. Membangun, memelihara citra pemerintah daerah yang baik melalui pembuatan pres reales setiap hari serta memantau opini publik terhadap citra pemerintah daerah kota sukabumi melalui cara mendokumentasikan dan analisis pemberitaan dan kliping berita.
6. Membina hubungan timbal balik dengan media massa, dengan mengesampingkan perbedaan pandangan, serta memfasilitasi wartawan dalam pembuatan dan pengiriman berita.

Secara internal infokom selalu melakukan konsolidasi dan komunikasi internal, baik melalui briefng staf maupun brainstorming, dengan harapan setiap aparatur yang bertugas di infokom mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, sehingga informasi dan pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh publik dengan jelas;

Supaya aparat infokom mampu berorganisasi, serta mampu membuat perencanaan(planning), mampu melaksanakan kegiatan, memonitor dan mengevaluasi hasil pekerjaan, seluruhnya dilibatkan dalam aktifitas sebagai pimplak, bendahara, pelaksana teknis dan sebagai peliput kegiatan ataupun penyiar di RSPD.

Upaya lain yang dilakukan agar aparat infokom mudah bergaul, mampu berkomunikasi dengan berbagai tingkatan dan semuka kalangan dilakukan melalui organisasi RAPI, Paguyuban monitor serta bertugas secara bergiliran di press room, bahkan ditugaskan melalui pencarian berita, penulisan artikel serta pengelolaan berita kota, baik sebagai redaktur pelaksana maupun sebagai sirkulasi, seting, analisis serta editor bahasa.

Disisi lain agar aparat infokom kota sukabumi mempunyai kepribadian yang menarik, dilakukan upaya penugasan sebagai presenter ataupun pewawancara dalam siaran langsung RSPD FM, termasuk memimpin requwes siaran radio.

Kemampuan berimajinasi serta pengembangan ide dan problem solving dilakukan penugasan menjawab pemberitaan negatif ataupun membuat hak jawab, somasi bahkan tuntutan terhadap pemberitaan yang bersifat subjektif serta tidak sesuai dengan UU nomo 40 ataupun kode etik jurnalistik.

Untuk merangsang minat belajar, staf digilir mengikuti liputan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial ataupun kegiatan event regional, nasional ataupun event baru yang menantang terhadap perkembangan ilmu komunikasi dan informasi. Termasuk dalam peliputan bantuan kemanusiaan, bencana alam ataupun demonstrasi serta unjuk rasa.

Sekecil apapun yang dilakukan oleh infokom kota sukabumi dari tahun 2004 s.d Agustus 2006 ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi pengembangan dan revitalisasi aparat kehumasan di Kota Sukabumi, karena berdasarkan pendapat Noeh Hatumena petinggi PWI Pusat, bahwa wartawan dan birokrat dimanapun sama mengabdikan pada masyarakat, karena keduanya public-servants. Media massa adalah representasi masyarakat tugasnya mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan memajukan kesejahteraan bersama. Masalahnya bagaimana mensinergikan kedua kepentingan itu (mutual trust) tanpa terkesan saling mencampuri.

Hendicap yang terjadi dewasa ini dikatakan oleh Direktur Program Hubungan Kelembagaan Publik dan Kenegaraan PWI Pusat, yaitu Pers umumnya karena gengsi menghendaki komunikasi langsung dengan pucuk pimpinan di daerah karena

pertimbangan eksklusivisme, sementara pejabat membatasi diri dalam hal menyampaikan sesuatu secara terbuka karena kuatir disalah gunakan pers.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.